



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 10 Mei 2025

Halaman: 2



ALOT: Warga melintas di dekat spanduk yang berisi penolakan warga Tegai Lempuyangan RT 02 RW 01, Kelurahan Bausasran, Danurejan, Jogja, terkait rencana penggusuran oleh PT KAI.

Legislatif Minta Tak Saling Klaim Kekancangan

Soal Polemik Penggusuran Stasiun Lempuyangan

JOGJA - Polemik rencana penggusuran rumah-rumah warga di kawasan Stasiun Lempuyangan menjadi atensi legislatif. Komisi A DPRD Kota Jogja pun melakukan dialog langsung bersama masyarakat terdampak kemarin (9/5). Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Indaruwanto Eko Cahyono mengatakan, melalui dialog tersebut pihaknya ingin melihat langsung bagaimana kondisi warga. Se-

kaligus bentuk tindak lanjut atas audiensi warga terdampak penggusuran Stasiun Lempuyangan kepada DPRD Kota Jogja beberapa waktu lalu.

Jajaran Komisi A DPRD Kota Jogja hadir sekitar lima orang. Dalam dialog tersebut, Ndaru menyampaikan bahwa hak atas penggunaan tanah masih belum jelas. Artinya, belum ada keputusan secara Keraton Ngayogyakarta apakah sudah memberikan hak atas tanah dan bangunan kepada warga maupun PT KAI.

Oleh karena itu, politisi PAN itu pun meminta agar pihak

pihak yang berseteru terkait dengan hak atas tanah dan bangunan di Stasiun Lempuyangan tidak saling klaim. Serta jangan melakukan prosedur yang menyalahi aturan.

"Saya sampaikan bahwa kekancangan akan jatuh ke PT KAI atau jatuh kepada warga itu masih menunggu," ujar Ndaru di sela dialog.

Legislatif pun menyoroti PT KAI yang sudah mendahului prosedur sebelum adanya keputusan resmi dari Keraton Ngayogyakarta. Misalnya dengan menawarkan ganti rugi kepada warga terdampak penggusuran Stasiun Lempuyangan.

yang.

Oleh karena itu, Ndaru memastikan, pihaknya bakal melakukan penelusuran terkait dengan hal tersebut. Bahkan, Komisi A DPRD Kota Jogja pun akan memanggil PT KAI agar memberikan bukti kepemilikan atas hak tanah di Stasiun Lempuyangan.

"PT KAI sudah menjanjikan banyak hal terkait dengan uang ganti rugi, seolah-olah mereka sudah pegang kekancangan dari Keraton," terangnya. Sementara itu, Ketua RW 01 Bausasran Danurejan Antonius Yosef Handriutomo memastikan, akan tunduk

dengan segala keputusan Keraton Ngayogyakarta. Perwakilan warga terdampak ini juga mengungkapkan ada 14 rumah yang kini menjadi sengketa antara warga dengan PT KAI.

Menurutnya, posisi antara warga dengan PT KAI untuk saat ini masih sama-sama mengajukan kekancangan. Oleh karena itu, dia berharap agar PT KAI tidak melakukan tindakan di luar prosedur. Terlebih sebelum ada keputusan resmi dari Keraton Ngayogyakarta. "Namun kami meyakini Sultan akan berpihak pada *kawula-nya* (rakyat)," tegas Antonius. (inu/wia/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005